

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Penelitian ini akan membahas mengenai asas keseimbangan dalam perjanjian parkir, dalam peristiwa parkir banyak pelaku usaha yang tidak menerapkan asas keseimbangan, padahal seharusnya asas tersebut ada sebagai dasar kesetaraan posisi para pihak.

Dalam dunia yang semakin moderen ini kemajuan perkembangan dari sektor ekonomi dan teknologi yang ada banyak melahirkan berbagai inovasi yang bermanfaat dalam pemenuhan bidang barang dan jasa, dalam hal ini produsen/pelaku usaha dan juga konsumen memiliki peran masing-masing dalam usaha memajukan perekonomian bangsa. Produsen bertugas untuk menyediakan produk berupa barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh konsumen, sedangkan konsumen bertugas menggunakan barang dan/atau jasa yang disediakan oleh konsumen.

Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa membawa dampak positif, antara lain, dapat disebutkan tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Akan tetapi, di lain pihak terdapat dampak negatif, yaitu dampak penggunaan dari teknologi tersebut serta perilaku

bisnis yang timbul karena makin ketatnya persaingan yang mempengaruhi masyarakat konsumen.<sup>1</sup>

Dalam praktiknya sendiri banyak produsen sebagai pelaku usaha memberlakukan syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungannya sendiri. Misalnya mengenai penetapan harga, ketentuan biaya dan lain-lain. Kerugian yang diderita oleh konsumen menimbulkan sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen, dimana yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen, yang ruang lingkupnya mencakup semua hukum, baik keperdataan, pidana, maupun dalam lingkup administrasi negara.<sup>2</sup>

Produsen dalam hal ini adalah pelaku usaha menjalankan usahanya terkadang melakukan tindakan yang merugikan konsumen yakni dengan menerapkan klausula-klausula baku yang berat sebelah dan tidak mempertimbangkan kedudukan dari konsumen itu sendiri. Konsumen cenderung tidak luput dari tindakan pelaku usaha dalam upaya menguntungkan diri sendiri. Seperti dalam penyediaan jasa perparkiran, pelaku usaha memberikan karcis parkir dengan menerapkan klausula baku di dalamnya.

Klausula baku sendiri keberadaannya telah diakui dan diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di dalam pasal tersebut terdapat mengenai ketentuan klausula baku, bagaimana seharusnya pencantuman klausula baku. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku

---

<sup>1</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.2.

<sup>2</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2011, h. 95.

usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>3</sup> Banyak kasus terjadi dimana pelaku usaha sebagai penyedia jasa parkir tidak mau mengganti rugi atas kehilangan kendaraan konsumen yang telah menggunakan jasa dari pelaku usaha tersebut, salah satu contohnya adalah dalam kasus Ramadhan.M dan Ariyanti sebagai konsumen di area parkir Mall Lembuswana (PT. Cipta Sumina Indah Satresna). Penggugat kehilangan kendaraan bermotornya saat diparkirkan di area parkir tersebut, namun pihak pelaku usaha tidak mau mengganti rugi. Pengadilan mengabulkan gugatan Ramadhan.M (penggugat I) dan Ariyanti (penggugat II), dan menghukum tergugat untuk mengganti rugi, selanjutnya tergugat mengajukan banding dengan putusan No. 122/Pdt /2009 /PT.Smda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda sebelumnya. Pada kasus tersebut dalam Putusan MA No. 2157 K/Pdt /2010 menolak permohonan kasasi tersebut, MA sudah tepat dalam putusannya menolak permohonan kasasi tergugat. Kasus lain yang terjadi adalah PT. Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking) vs. Sumito Y. Viansyah. Dimana penggugat (Sumito Y. Viansyah) juga kehilangan kendaraannya di area parkir namun pihak pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kehilangan tersebut. Karena dalam klausula baku yang ada dalam karcis parkir yang berbunyi:

“Asuransi kendaraan dan barang-barang di dalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang di dalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penggantian dalam bentuk apapun dari penyedia parkir)”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen).

<sup>4</sup> Lihat dalam Putusan MA No.2078/K/Pdt/2009, h.13.

Pencantuman klausula baku oleh PT. Cipta Sumina Indah Satresna yang berbunyi:

“segala kehilangan dan kerusakan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang di dalamnya adalah resiko sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun) dan bukan tanggung jawab pengelola”<sup>5</sup>

Ketentuan tersebut menurut penulis sudah dapat dikatakan bahwa kedudukan pelaku usaha lebih dominan dan akan memberikan keuntungan yang lebih kepada pelaku usaha itu sendiri dan alasan lain menurut penulis isi dari klausula tersebut tidaklah relevan karena sama saja dengan mengalihkan tanggungjawab pelaku usaha, dilarang dalam pencantuman klausula baku dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a karena menurut penulis pencantuman klausula baku dalam karcis parkir tersebut sangat merugikan konsumen dan membuat posisi konsumen sangat lemah. Apa bila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak yang lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian.

Namun dalam memberikan putusan seharusnya hakim juga mempertimbangkan putusannya dengan memperhatikan asas keseimbangan dalam perjanjian, karena sejatinya menurut penulis karcis parkir adalah bukti dari suatu perjanjian dan dalam perjanjian sendiri ada yang dinamakan dengan asas keseimbangan maka dalam pencantuman klausula baku karcis parkir harus mencerminkan adanya asas keseimbangan, sedangkan menurut penulis dasar pertimbangan hakim kurang lengkap dimana seharusnya dalam putusan tersebut hakim juga mempertimbangkan asas perjanjian bahwa antara pelaku usaha dan

---

<sup>5</sup> Lihat dalam Putusan MA No.2157/K/Pdt/2010, h.3.

konsumen harus ada asas keseimbangan dalam sehingga menjadikan kedudukan kedua pihak menjadi seimbang.

Dalam pasal 18 ayat (1) angka (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) menyatakan bahwa:

“setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”.<sup>6</sup>

Perlu digaris bawahi bahwa klausula yang ada dalam karcis/kartu parkir tersebut batal demi hukum, namun perjanjian perparkiran tersebut tetap ada hanya klausul bakunya yang hilang. Hal tersebut menguatkan fakta bahwa hakim memang harus mempertimbangkan asas keseimbangan dalam perjanjian dalam putusannya karena perjanjian perparkiran tersebut tetap berlaku.

Karena karcis parkir merupakan bentuk dari perjanjian maka secara tidak langsung unsur-unsur yang ada dalam perjanjian salah satunya asas keseimbangan sebagai tolak ukur dalam membuat perjanjian, asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperlihatkan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen.

<sup>7</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h. 90.

Untuk menjelaskan makna keseimbangan, AB Massier & Marjanne Termorshuizen-Arts mengajukan pengertian “ketidakseimbangan” (*onvenwichtigheid, onevenredigheid*). Untuk penerapannya hakim memperhatikan adanya indikasi/patokan tertentu yang merupakan dasar bagi kesimpulan bahwa telah terjadi penyalahgunaan keadaan yang dimungkinkan karena adanya ketidakseimbangan kedudukan para pihak. Jadi Massier & Termorshuizen memberikan makna sama untuk kata “*everendigheid*” yang berarti keseimbangan, keserasian, kesebandingan, (*everendigheidsbeginsel*-asas keseimbangan).<sup>8</sup> Asas keseimbangan menekankan dimana kedua belah pihak saling memenuhi hak dan kewajiban para pihak secara wajar dan tidak membebankan kepada salah satu pihak saja.<sup>9</sup>

Adanya ketidakseimbangan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen menyebabkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku lebih menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen.<sup>10</sup> Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan,<sup>11</sup> sedangkan yang dimaksud dengan Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia sendiri maupun bersama-sama

---

<sup>8</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, h.97.

<sup>9</sup> Nuraini Apriliana R, *kajian terhadap asas proporsionalitas dan asas keseimbangan dalam perjanjian waralaba sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba*, Privat Law, Edisi 3 November 2013- Maret 2014, h.44.

<sup>10</sup> Dedi Harianto, *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11, Nomor 2, 2016, h, 145.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen.



melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>12</sup>

Perjanjian yang demikian sering kali di ibaratkan seperti pertarungan antara “David vs. Goliath”, dimana adanya dua kekuatan yang tidak seimbang, antara pihak yang mempunyai *bargaining position* kuat (penguasa, pemilik usaha/modal yang di ibaratkan sebagai Goliath) dan pihak yang lemah (di ibaratkan sebagai david) dengan hasil pihak yang lemah harus menerima segala isi kontrak dengan terpaksa.<sup>13</sup> Keseimbangan antara kepentingan berarti pendekatannya benar-benar tidak memihak, menganggap sama dalam prinsip dan berusaha menemukan penyesuaian.<sup>14</sup> Jadi, tidak ada pihak yang berada dalam posisi lebih kuat sementara pihak yang lainnya berada dalam posisi yang lemah.<sup>15</sup>

Secara sederhana perjanjian baku memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Perjanjian baku dibuat secara sepihak oleh produsen yang posisinya lebih kuat dari konsumen
2. Konsumen tidak dilibatkan dalam menentukan isi klausula baku
3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal
4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan.<sup>16</sup>

Fenomena adanya ketidakseimbangan posisi dalam berkontrak dapat dicermati dari beberapa model kontrak, terutama kontrak-kontrak konsumen dalam bentuk standar/baku yang di dalamnya memuat klausul-klausul yang isinya

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, angka 3.

<sup>13</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2014, h.2.

<sup>14</sup> Yassir Arafat, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang dalam Kontrak*, Jurnal Rechts, Vol. 4, No. 2, Desember 2015. h.35.

<sup>15</sup> *Ibid.* h.33.

<sup>16</sup> Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.93.

cenderung berat sebelah.<sup>17</sup> Perjanjian dengan klausula baku terjadi dengan beberapa cara, hingga saat ini pemberlakuan klausula baku tersebut salah satunya adalah pencantuman klausula baku dalam lembaran kertas berupa table, bon, kuitansi, tanda terima seperti pada toko, kedai dan *supermarket*.<sup>18</sup>

Menurut sejarah, awal abad ke-19 di mana telah terjadi Revolusi Industri, telah membuat perjanjian atau kontrak baku muncul. Perjanjian baku dimuat karena tidak memerlukan waktu lama untuk melakukan negosiasi. Jadi kontrak baku muncul karena latar belakang social, ekonomi dan praktis.<sup>19</sup>

Dalam hal demikian pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku.<sup>20</sup> Penerapan klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat mengakibatkan sangat merugikan pihak lemah, biasa dikenal dengan penyalahgunaan keadaan.<sup>21</sup> Dalam hubungannya dengan kontrak secara umum asas keseimbangan bermakna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang membuat kontrak.<sup>22</sup>

Dalam hal ini peranan pemerintah sebagai pemegang regulasi dan kebijakan sangat penting. Tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan untuk perlindungan konsumen dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen.<sup>23</sup> Perlindungan konsumen dirasa sangat penting karena melihat bahwa semua orang juga berperan sebagai konsumen, termasuk

---

<sup>17</sup>*Op.Cit.* h.3.

<sup>18</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, h.76.

<sup>19</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Cetakan ke-5, Kencana, Jakarta, 2017, h.218.

<sup>20</sup> Ahmadi Miru- Sutarman Yudo, *hukum Perlindungan Konsumen*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, h.114.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h.115.

<sup>22</sup> Muhammad Syaifuddin, *Loc.Cit.*

<sup>23</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusamedia, Bandung, 2010, h.63.



dalam perjanjian baku dalam karcis parkir yang hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Jadi jika terjadi praktik kecurangan terhadap konsumen hal itu dapat dikatakan merupakan masalah nasional dan juga mengenai prinsip keadilan bagi semua orang.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dalam setiap penelitian tentunya ada permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka permasalahan yang hendak dibahas penulis adalah :

Apakah dijumpai Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Perparkiran?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.<sup>24</sup> Dalam melakukan suatu penelitian tentunya ada tujuan mengapa suatu penelitian tersebut dilakukan, untuk mencapai sesuatu apa penelitian tersebut dilakukan, berikut ini merupakan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep dalam perjanjian perparkiran.
2. Untuk mengetahui bagaimana asas keseimbangan dalam perjanjian perparkiran.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis

---

<sup>24</sup> Sri Harini Dwiyatmi, *Penelitian dan Penulisan Hukum*, h.25.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu kita lebih memahami tentang bagaimana konsep dalam perjanjian perpajakan dan hubungan hukum apa yang ada dalam perjanjian tersebut
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan kita akan klausula baku dan bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian perpajakan yang ada selama ini.
2. Manfaat Praktis  
Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan kita bagaimana seharusnya perjanjian perpajakan itu, dan menambah wawasan kita mengenai pentingnya asas keseimbangan dalam perjanjian perpajakan.

## **E. METODE PENELITIAN**

Dalam hal metodologi dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian hukum normatif,

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum atau normatif, bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah bahan hukum primer, yaitu Perundang-undangan yang berlaku, di samping itu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

### **2. Jenis Pendekatan**

Jenis pendekatan yang dilakukan antara lain:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dimana dengan melihat dari Undang-Undang yang berlaku dan juga Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dalam pendekatan perundang-undangan penulis perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan

perundang-undangan.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis adalah dengan melihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut Undang-Undang LLAJ), Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*) Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>26</sup> Kasus yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah pada Putusan MA Nomor. 2157 K/Pdt /2010 dan Putusan MA Nomor. 2078 K/Pdt/2009 kedua kasus tersebut adalah kasus kehilangan kendaraan konsumen dalam peristiwa perparkiran.
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h,137.

<sup>26</sup> *Ibid.* h.134.

konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>27</sup> Pendekatan konseptual menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>28</sup>

Penulis menggunakan pendekatan konsep untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu atau masalah dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis menggunakan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum seperti pandangan-pandangan dari Mariam Darus Badruzaman, Soemitra, dan Ahmadi Miru mengenai apa itu asas keseimbangan dan pengertian-pengertian lainnya.

### 3. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yakni terdiri dari Perundang-

---

<sup>27</sup>*Ibid*, h.135.

<sup>28</sup> Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, diakses dari <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>, pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 17.14.

Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>29</sup>, yakni :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
  3. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22 Tahun 2009)
  4. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  5. Putusan MA Nomor. 2157 K/Pdt /2010
  6. Putusan MA Nomor. 2078 K/Pdt/2009
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi mengenai hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar terhadap putusan pengadilan.<sup>30</sup>
4. Unit Analisis dan Unit Amatan
- Unit analisis dari penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini adalah lebih mengaris bawahi mengenai asas keseimbangan dalam penerapannya terhadap perjanjian perparkiran, dan unit amatan dari penelitian ini adalah karcis parkir.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dari skripsi yang akan ditulis adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h.181.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit*.

- Bab I skripsi ini berisi pendahuluan (Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, dan Tujuan Penulisan, di samping itu dalam bab I juga dikemukakan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan)
- Bab II berisi mengenai konsep perjanjian perparkiran kaitannya dengan hubungan hukum dalam peristiwa perparkiran, jenis perjanjian perparkiran yang merupakan perjanjian nominaat dan klausula baku yang ada dalam perjanjian perparkiran
- Bab III berisi pembahasan mengenai asas keseimbangan dalam perjanjian perparkiran yang terdiri dari pengertian asas keseimbangan dalam perjanjian, ketiadaan asas keseimbangan dalam perjanjian perparkiran, dan perlunya asas keseimbangan dalam perjanjian perparkiran.
- Bab IV berisi tentang kesimpulan dan saran.